



BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan pada tahap penyaluran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 110);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

RINCIAN BAGI HASIL PDRD

Pasal 2

- (1) Besarnya bagi hasil PDRD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari proyeksi realisasi penerimaan hasil PDRD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Alokasi Bagi Hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.994.000.000.00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Alokasi pajak daerah sebesar Rp. 2.750.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - b. Alokasi retribusi daerah sebesar Rp. 244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. Alokasi Dasar sebesar 60% (enam puluh persen) dari total realisasi PDRD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. Alokasi Formula sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil PDRD dari desa masing-masing.
- (4) Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menggunakan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- (5) Rumus perhitungan Alokasi Bagi Hasil PDRD yaitu:

Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah = $ADp + AFp$

$AFp = RPPDRDp \times RPPDRDK / 100$

Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah = $ADr + Afr$

$Afr = RPPDRDr \times RPPDRDK / 100$

Keterangan :

ADp : Alokasi Dasar Pajak Daerah

- AFp : Alokasi Formula Pajak Daerah
 ADr : Alokasi Dasar Retribusi Daerah
 AFr : Alokasi Formula Retribusi Daerah
 RPPDRDp : Realisasi Penerimaan PDRD Pajak Daerah
 RPPDRDr : Realisasi Penerimaan PDRD Retribusi Daerah
 RPPDRDk : Realisasi Penerimaan PDRD Kabupaten
- (6) Besaran rincian alokasi bagi hasil PDRD masing-masing desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana bagi hasil PDRD kepada desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran PDRD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu pertama bulan Desember sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran PDRD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Surat Permohonan Penyaluran kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara melalui Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - c. Laporan realisasi penyerapan dana bagi hasil PDRD tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran PDRD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Surat Permohonan Penyaluran kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara melalui Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) PDRD sampai dengan tahap I;
- (5) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana bagi hasil PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

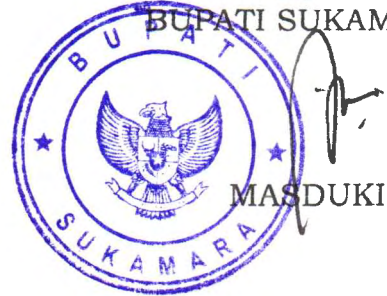
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 11 September 2025

BUPATI SUKAMARA,



Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 11 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 28

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUAMARA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

ALOKASI BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi PBB Tahun 2023	Bobot	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah	Pagu Bagi Hasil Retribusi Daerah (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)+(8)	(10)=(5)+(9)	
1	1	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	5.048.276	56.299.237	5,220	5.094.999	10.143.274,53	10.143.275,00
2	2	62.08.01.2002		PUDU	5.048.276	32.883.979	3,049	2.975.952	8.024.227,90	8.024.228,00
3	3	62.08.01.2005		KARTAMULIA	5.048.276	70.144.167	6,504	6.347.945	11.396.220,47	11.396.220,00
4	4	62.08.01.2006		SUKARAJA	5.048.276	7.370.419	0,683	667.012	5.715.288,01	5.715.288,00
5	5	62.08.01.2007		PANGKALAN MUNTAL	5.048.276	23.175.019	2,149	2.097.305	7.145.581,21	7.145.581,00
6	6	62.08.01.2008		PETARIKAN	5.048.276	10.450.697	0,969	945.773	5.994.048,67	5.994.049,00
7	7	62.08.02.2002	JELAI	PULAU NIBUNG	5.048.276	14.557.994	1,350	1.317.477	6.365.753,04	6.365.753,00
8	8	62.08.02.2003		SUNGAI BARU	5.048.276	26.101.443	2,420	2.362.142	7.410.418,31	7.410.418,00
9	9	62.08.02.2004		SUNGAI BUNDUNG	5.048.276	4.268.458	0,396	386.289	5.434.565,07	5.434.565,00
10	10	62.08.02.2005		SUNGAI RAJA	5.048.276	10.055.224	0,932	909.983	5.958.258,94	5.958.259,00
11	11	62.08.03.2001	BALAI RIAM	JIHING	5.048.276	136.033.275	12,614	12.310.813	17.359.088,45	17.359.088,00
12	12	62.08.03.2002		AIR DUA	5.048.276	26.034.894	2,414	2.356.120	7.404.395,72	7.404.396,00
13	13	62.08.03.2005		LUPU PERUCA	5.048.276	11.021.697	1,022	997.447	6.045.723,33	6.045.723,00
14	14	62.08.03.2006		BALAI RIAM	5.048.276	20.338.730	1,886	1.840.625	6.888.901,20	6.888.901,00
15	15	62.08.03.2007		PEMPANING	5.048.276	1.923.818	0,178	174.103	5.222.378,58	5.222.379,00
16	16	62.08.03.2011		SEKUNING BARU	5.048.276	81.302.154	7,539	7.357.726	12.406.001,98	12.406.002,00
17	17	62.08.03.2012		BANGUN JAYA	5.048.276	94.401.272	8,753	8.543.177	13.591.453,02	13.591.453,00
18	18	62.08.03.2013		BUKIT SINGKAI	5.048.276	79.457.786	7,368	7.190.814	12.239.089,37	12.239.089,00
19	19	62.08.04.2001	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	5.048.276	34.671.741	3,215	3.137.742	8.186.017,75	8.186.018,00
20	20	62.08.04.2002		SUNGAI TABUK	5.048.276	33.689.846	3,124	3.048.882	8.097.157,69	8.097.158,00
21	21	62.08.04.2003		SUNGAI CABANG BARAT	5.048.276	22.832.994	2,117	2.066.353	7.114.628,45	7.114.628,00
22	22	62.08.04.2004		SUNGAI PASIR	5.048.276	23.804.061	2,207	2.154.233	7.202.508,60	7.202.509,00
23	23	62.08.05.2001	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	5.048.276	64.118.134	5,945	5.802.597	10.850.873,29	10.850.873,00
24	24	62.08.05.2002		LAMAN BARU	5.048.276	10.405.251	0,965	941.660	5.989.935,87	5.989.936,00
25	25	62.08.05.2003		AJANG	5.048.276	57.610.367	5,342	5.213.654	10.261.929,88	10.261.930,00
26	26	62.08.05.2004		SEMANTUN	5.048.276	15.403.263	1,428	1.393.973	6.442.248,65	6.442.249,00
27	27	62.08.05.2005		NIBUNG TERJUN	5.048.276	10.319.569	0,957	933.906	5.982.181,78	5.982.182,00
28	28	62.08.05.2006		NATAI KONDANG	5.048.276	62.970.054	5,839	5.698.698	10.746.973,72	10.746.974,00
29	29	62.08.05.2007		SEMBIKUAN	5.048.276	36.824.911	3,415	3.332.601	8.380.876,49	8.380.876,00
Total					146.400.000	1.078.470.454	100	97.600.000	244.000.000,00	244.000.000,00

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	244.000.000
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah	244.000.000
Pagu Alokasi Dasar (60%*Pagu Retribusi Daerah)	146.400.000
Total Pagu Alokasi Dasar	146.400.000
Pagu Bagian Formula (40%*Total Pagu Retribusi Daerah)	97.600.000
Total Pagu Bagian Formula	97.600.000
Jumlah Desa	29



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUKAMARA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG ALOKASI
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Realisasi PBB Tahun 2023	Bobot	Alokasi Formula	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah	Pagu Bagi Hasil Pajak Daerah (Pembulatan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)*(8)	(10)=(5)*(8)
1	62.08.01.2001	SUKAMARA	NATAI SEDAWAK	56.896.552	56.299.237	5,220	57.423.141	114.319.692,50	114.319.692
2	62.08.01.2002		PUDU	56.896.552	32.883.979	3,049	33.540.443	90.436.994,83	90.436.995
3	62.08.01.2005		KARTAMULIA	56.896.552	70.144.167	6,504	71.544.458	128.441.009,35	128.441.009
4	62.08.01.2006		SUKARAJA	56.896.552	7.370.419	0,683	7.517.555	64.414.106,67	64.414.107
5	62.08.01.2007		PANGKALAN MUNTAI	56.896.552	23.175.019	2,149	23.637.663	80.534.214,50	80.534.214
6	62.08.01.2008		PETARIKAN	56.896.552	10.450.697	0,969	10.659.325	67.555.876,38	67.555.876
7	62.08.02.2002	JELAI	PULAU NIBUNG	56.896.552	14.557.994	1,350	14.848.616	71.745.167,50	71.745.168
8	62.08.02.2003		SUNGAI BARU	56.896.552	26.101.443	2,420	26.622.507	83.519.058,81	83.519.059
9	62.08.02.2004		SUNGAI BUNDUNG	56.896.552	4.268.458	0,396	4.353.669	61.250.221,11	61.250.221
10	62.08.02.2005		SUNGAI RAJA	56.896.552	10.055.224	0,932	10.255.957	67.152.508,54	67.152.509
11	62.08.03.2001	BALAI RIAM	JIHING	56.896.552	136.033.275	12,614	138.748.912	195.645.464,08	195.645.464
12	62.08.03.2002		AIR DUA	56.896.552	26.034.894	2,414	26.554.630	83.451.181,29	83.451.181
13	62.08.03.2005		LUPU PERUCA	56.896.552	11.021.697	1,022	11.241.724	68.138.275,27	68.138.275
14	62.08.03.2006		BALAI RIAM	56.896.552	20.338.730	1,886	20.744.753	77.641.304,55	77.641.305
15	62.08.03.2007		PEMPANING	56.896.552	1.923.818	0,178	1.962.223	58.858.774,97	58.858.775
16	62.08.03.2011		SEKUNING BARU	56.896.552	81.302.154	7,539	82.925.192	139.821.743,66	139.821.744
17	62.08.03.2012		BANGUN JAYA	56.896.552	94.401.272	8,753	96.285.808	153.182.359,85	153.182.360
18	62.08.03.2013		BUKIT SINGKAI	56.896.552	79.457.786	7,368	81.044.005	137.940.556,48	137.940.556
19	62.08.04.2001	PANTAI LUNCI	SUNGAI DAMAR	56.896.552	34.671.741	3,215	35.363.894	92.260.445,99	92.260.446
20	62.08.04.2002		SUNGAI TABUK	56.896.552	33.689.846	3,124	34.362.398	91.258.949,38	91.258.949
21	62.08.04.2003		SUNGAI CABANG BARAT	56.896.552	22.832.994	2,117	23.288.810	80.185.361,64	80.185.362
22	62.08.04.2004		SUNGAI PASIR	56.896.552	23.804.061	2,207	24.279.262	81.175.814,08	81.175.814
23	62.08.05.2001	PERMATA KECUBUNG	KENAWAN	56.896.552	64.118.134	5,945	65.398.127	122.294.678,43	122.294.678
24	62.08.05.2002		LAMAN BARU	56.896.552	10.405.251	0,965	10.612.971	67.509.523,14	67.509.523
25	62.08.05.2003		AJANG	56.896.552	57.610.367	5,342	58.760.445	115.656.996,63	115.656.997
26	62.08.05.2004		SEMANTUN	56.896.552	15.403.263	1,428	15.710.759	72.607.310,64	72.607.311
27	62.08.05.2005		NIBUNG TERJUN	56.896.552	10.319.569	0,957	10.525.579	67.422.130,67	67.422.131
28	62.08.05.2006		NATAI KONDANG	56.896.552	62.970.054	5,839	64.227.128	121.123.679,27	121.123.679
29	62.08.05.2007		SEMBIKUAN	56.896.552	36.824.911	3,415	37.560.048	94.456.599,80	94.456.600
Total				1.650.000.000	1.078.470.454	100	1.100.000.000	2.750.000.000,00	2.750.000.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	2.750.000.000,00
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah	2.750.000.000,00
Pagu Alokasi Dasar (60%*Pagu Pajak Daerah)	1.650.000.000,00
Total Pagu Alokasi Dasar	1.650.000.000,00
Pagu Bagian Formula (40%*Total Pagu Pajak Daerah)	1.100.000.000,00
Total Pagu Bagian Formula	1.100.000.000,00
Jumlah Desa	29

